

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI PERSYARATAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh  
M. FADJERI RAMADHAN**

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pemalsuan dokumen Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai persyaratan bekerja di luar negeri. Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini terus menjadi sorotan. TKI sering dijadikan obyek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas hak asasi manusia. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari penyidik Polda Lampung, Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri termasuk dalam peran normatif, ideal dan faktual. Peran normatif dilaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan Hukum Acara Pidana. Peran ideal dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penyidikan dan pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Peran faktual dilaksanakan berdasarkan kenyataan adanya kasus pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri terhadap 53 TKW ilegal oleh Tersangka M. Yasin dan Siti Maryah di Condet Jakarta Selatan. Peran ini dilaksanakan melalui proses penyidikan, yaitu

*M. Fadjeri Ramadhan*

serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri. (2) Faktor-faktor penghambat peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri adalah: a) Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia b) Faktor sarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium forensik di Polda Lampung c) Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum d) Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidik Kepolisian Daerah Lampung mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja. (2) Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan ketenagakerjaan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan.

**Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penyidikan, Pemalsuan Dokumen, TKW**